

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BRM. Suryo Triono<sup>1)</sup>, Septiana Novita Dewi<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> STIE AUB Surakarta

\*Email korespondensi: [brmsuryotriono@gmail.com](mailto:brmsuryotriono@gmail.com)

### Abstract

The purpose of this study is to provide empirical evidence about the analysis of the influence of the internal control system on the quality of local government financial reports (Empirical Study on SKPD of Sukoharjo Regency). The analysis technique used in this study is the data quality test which includes validity test and reliability test, classic assumption test which includes normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test, multiple linear regression equation test, and hypothesis test which includes t test, F test, and R2 Test. The results of the study indicate that the Control environment has a significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports. Risk Assessment has a significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports. Control activities have no significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports. Information and Communication have a significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports. Monitoring has a significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports. The results of the F test show that there are significant independent variables together on the dependent variable. Based on R2 test results show that the ability of control environment variables, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring can explain the variable quality of local government financial statements of 69%. and the remaining 31% is explained by other independent variables.

**Keywords:** *Internal Control System, Quality of Daerah Government Financial Reports*

**Saran sitasi:** Triyono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 213-220. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>

### 1. PENDAHULUAN

Era globalisasi ini, organisasi dituntut Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2013).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan

pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat

diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2012).

Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. "Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) (Nasution, 2007). Kemudian unsur dari sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. lingkungan pengendalian
2. penilaian risiko
3. kegiatan pengendalian
4. informasi dan komunikasi dan
5. pemantauan pengendalian intern.

Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 tentang Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemda yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara berbunyi "Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah." Tujuan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. (Nasution, 2007).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Dalam meningkatkan penilaian resiko, Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meningkatkan informasi dan komunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki system informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan. Untuk dapat

meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah, pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan pelimpah tugas secara sistematis ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya *checks and balances*. Sebaiknya aparat pengawasan (Inspektorat Daerah) hendaknya lebih efektif dalam melakukan pembinaan seperti melakukan kontrol secara rutin pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai system pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak pada opini BPK, untuk pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan penilaian BPK untuk laporan keuangannya pada tahun 2011 masih mendapatkan opini WDP, salah satu penyebab pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih mendapatkan opini WDP karena masih ada masalah dalam penerapan SPI, sehingga itu untuk mencapai opini yang lebih tinggi dari BPK maka diperlukan peningkatan penerapan sistem pengendalian intern terutama pada system pengendalian akuntansi dan pelaporan, pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan struktur Pengendalian intern. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan memperluas lokasi penelitian dan memperluas objek penelitian yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan koperasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka koperasi simpan pinjam juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal

Mengingat bahwa system pengendalian intern pemerintah merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar

pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)”. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2017).

**2. METODE PENELITIAN**

Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 28 SKPD dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental sampling*. *Random sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan memilih dari beberapa SKPD. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 pegawai. Data yang diperoleh melalui hasil proses pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) yang disebarakan langsung kepada para pegawai pemerintah SKPD Kabupaten Sukoharjo. Analisis data menggunakan software SPSS dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji analisis regresi linier berganda, uji t dan uji koefisien determinasi.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengujian Asumsi Klasik**

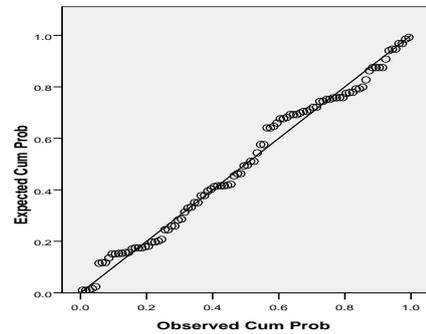
a. Hasil Uji Normalitas

Tabel IV.1

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



Sumber: data yang diolah, 2020

Pengujian normalitas data dengan menggunakan analisis grafik dan berdasarkan grafik normal yang disajikan diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas data disajikan pada tabel IV.11

Tabel IV.11

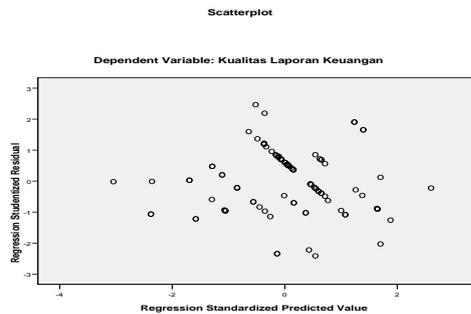
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF	Keputusan
Lingkungan Pengendalian	0,414	2,414	Bebas Multikolinieritas
Penilaian Resiko	0,378	2,649	Bebas Multikolinieritas
Kegiatan Pengendalian	0,835	1,197	Bebas Multikolinieritas
Informasi dan Komunikasi	0,768	1,302	Bebas Multikolinieritas
Pemantauan	0,738	1,355	Bebas Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas dapat dilihat bahwa pada setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada multikolinieritas antar variabel.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel IV.4  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data yang diolah, 2020

Grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar, baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Y berdasarkan masukan variabel independen  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ .

d. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel IV.3  
Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,840 <sup>a</sup>	,706	,690	,960	1,713

a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Penilaian Resiko  
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV. 14 di atas menunjukkan bahwa nilai durbin Watson sebesar 1,713 dan menunjukkan bahwa nilai durbin Watson sebesar 1,713 terletak antara -2 sampai dengan +2, sehingga data tidak terjadi autokorelasi.

**Pengujian Hipotesis**

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel IV.5  
Hasil Analisis Regresi  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,576	1,685		,342	,733		
	Lingkungan Pengendalian	,169	,072	,203	2,338	,021	,414	2,414
	Penilaian Resiko	,399	,082	,440	4,832	,000	,378	2,649
	Kegiatan Pengendalian	-,033	,045	-,045	-,736	,464	,835	1,197
	Informasi Dan Komunikasi	,154	,050	,196	3,069	,003	,768	1,302
	Pemantauan	,266	,050	,348	5,339	,000	,738	1,355

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.13 diperoleh hasil dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,576 + 0,169X_1 + 0,399X_2 - 0,033X_3 + 0,154X_4 + 0,266X_5$$

- $\alpha = 0,576$ , menunjukkan apabila Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan nol atau konstan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik.
- $\beta_1 = 0,169$ , menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya apabila Lingkungan Pengendalian ditingkatkan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
- $\beta_2 = 0,399$ , menunjukkan bahwa Penilaian Resiko berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, artinya apabila Penilaian Resiko ditingkatkan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
- $\beta_3 = -0,033$ , menunjukkan bahwa Kegiatan Pengendalian berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya apabila Kegiatan Pengendalian ditingkatkan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan menurun.
- $\beta_4 = 0,154$ , menunjukkan bahwa Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya apabila Informasi dan Komunikasi ditingkatkan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
- $\beta_5 = 0,266$ , menunjukkan bahwa Pemantauan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya apabila Pemantauan ditingkatkan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
- Nilai koefisien regresi variabel penilaian resiko memiliki koefisien regresi paling besar diantara variabel yang lainnya, artinya variabel penilaian resiko merupakan variabel dominan dalam penelitian ini.

**Hasil Uji t**

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

a) Lingkungan Pengendalian ( $X_1$ ) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,338 dengan tingkat signifikan  $0,021 < 0,05$  maka  $H_0$  Diterima, yang berarti variabel Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi:

H1: Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Terbukti Kebenarannya).

b) Penilaian Resiko ( $X_2$ ) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,832 dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  Diterima, yang berarti variabel Penilaian Resiko berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi:

H2: Penilaian Resiko Berpengaruh Signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Terbukti Kebenarannya)

c) Kegiatan Pengendalian ( $X_3$ ) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,736 dengan tingkat signifikan  $0,464 > 0,05$  maka  $H_0$  Ditolak, yang berarti variabel Kegiatan Penendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi:

H3: Kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Tidak Terbukti Kebenarannya)

d) Informasi dan Komunikasi ( $X_4$ ) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,069 dengan tingkat signifikan  $0,003 < 0,05$  maka  $H_0$  Diterima, yang berarti variabel Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi:

H4: Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Terbukti Kebenarannya)

e) Pemantauan ( $X_5$ ) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,339 dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  Ditolak, yang berarti variabel Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi:

H5: Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Terbukti Kebenarannya)

### **Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan hasil uji  $R^2$  pada tabel IV.15 diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,690. Maka, dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan dapat menjelaskan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 69%. dan sisanya 31% dijelaskan oleh variabel independen lain. Misalnya Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Keuangan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan.**

Lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah serta lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti lingkungan pengendalian perlu ditingkatkan dan dioptimalkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara: Pembentukan struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan. Sudah merealisasikan pengintegrasian (penyatuan) terhadap semua komponen dalam perangkat daerah. Penegakan integritas dan nilai etika sudah dilakukan dengan baik. Menciptakan kepemimpinan yang kondusif. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

#### **Pengaruh penilaian resiko terhadap kualitas laporan keuangan.**

Penilaian Resiko berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, serta penilaian resiko berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti penilaian resiko perlu ditingkatkan dan dioptimalkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara: Identifikasi dan analisis resiko sudah dilaksanakan dengan baik. Memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah. Sudah menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan factor internal. Pimpinan Instansi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

**Pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan.**

Pengendalian berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta kegiatan penendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti kegiatan pengendalian tidak mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan pengendalian yang selama ini sudah dilaksanakan dapat dipertahankan saja.

**Pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan.**

Informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan dan dioptimalkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara: Pimpinan sudah mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan, informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Seluruh pegawai mengerti tentang informasi yang diberikan pimpinan. Pimpinan sudah menyelenggarakan komunikasi dengan baik. Menyediakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dengan lengkap. Seluruh pegawai memanfaatkan sarana komunikasi dengan baik. Seluruh pegawai mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi komunikasi dengan baik.

**Pengaruh pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan.**

Pemantauan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara: Pemantauan memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang digunakan. Evaluasi kegiatan dengan melihat peluang adanya alternative kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, dan efisien. Tindak lanjut dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek. Menjadikan kebijakan yang mampu mempertanggung jawabkan penggunaan data publik. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna

utama yang dibagi dalam pemantauan. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja, kebijakan dilakukan dalam pemantauan.

**4. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penilaian Resiko berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Kegiatan Penendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

**5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, kami penulis mengucapkan terima kasih kepada STIE AUB Surakarta khususnya P3M STIE AUB Surakarta yang telah memberikan kesempatan dalam mengikuti penelitian hibah internal dan kami ucapkan terima kasih kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan menjadi obyek dalam penelitian ini

**6. REFERENSI**

- Aditya dan Surjono, 2017. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *SIKAP, Vol 2 (No. 1), 2017, hal 49-62 p-ISSN: 2541-1691*. DOI: <https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i1>
- Anwar Nasution, 2017. *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah*. Jakarta: IAI-KSAP
- Askam Tuasikal, 2017. *Pengaruh Sistem Akiuntansi dan Pengelolaan Keuanga Daerah terhadap kinerja SKPD*. Jurusan Akuntansi, Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

- Askikarno, 2009. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis ISSN: 2528-2093 (print), ISSN: 2528-1216 (online) Vol 4, No 2, Desember 2019* <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>.
- Depitasari, Ekawati, Yunita, 2014. Pengaruh Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Manajemen Bisnis Vol.3 No.5, STIE Multi Data Palembang*
- Herawati Tuti, 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School
- Indra Bastian. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Pakaya, 2013. *Tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara)*. Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
- Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo, 2014. *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*.
- Mahmudi 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. edisi kedua UPP STIM YPKN Yogyakarta
- Mahsun Muhamad, 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Putri, Darmawan dan Werastuti, 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng)*.
- Pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*.
- Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004. *Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut*
- Pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 239 ayat (1) tanggal 15 Mei 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1, 2 dan 3. *Sistem Pengendalian Intern*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 – 43. *Sistem Pengendalian Intern*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan Sugiyono, 2011 Metodologi Penelitian*
- Rai, I Gusti Agung, 2010. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukmana dan Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya)*. *Jurnal Akuntansi FE UNSIL, Vol. 4, No. 1, 2009*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.